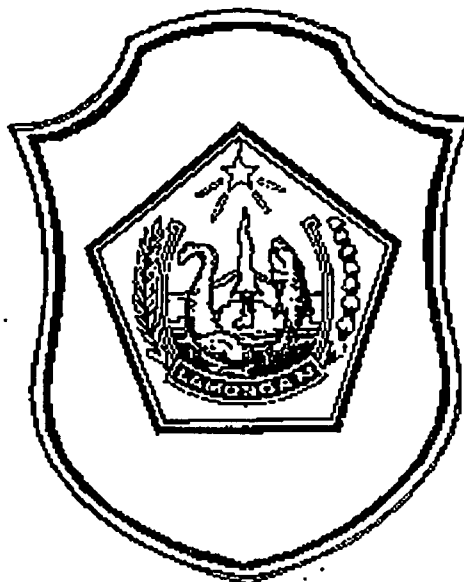


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Jl. Basuki Rahmad No. 2 ☎ (0322) 321010
E-Mail: dppka@lamongan.go.id, Web site : www.lamongan.go.id

LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2011**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dapat disusun atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Tahun 2011 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LAKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dari penyusunan LAKIP Tahun 2011 ini, semoga mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah SWT sehingga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Januari 2012

**KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN**



Drs. HERY PRANOTO

Pembina Tingkat I
NIP. 19620805 198903 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan Tahun 2011 merupakan tolak ukur Dinas dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. LAKIP disusun oleh Dinas sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan dimana program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 program dan 58 kegiatan. Adapun 5 program dan 58 kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sedangkan anggaran yang diperlukan untuk mendukung program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.762.988.250,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.244.559.398,- atau sebesar 96,71 %. Keberhasilan program dan kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
▪ Struktur Organisasi	4
▪ Personil	5
▪ Sarana dan Prasarana	6
▪ Pendapatan	8
▪ Pembiayaan	8
C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK	8
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEJIK	
▪ Visi	11
▪ Misi	12
▪ Tujuan	12
▪ Sasaran	12
▪ Kebijakan	13
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011	13
▪ Sasaran dan Indikator Sasaran	14
▪ Program	14
▪ Kegiatan dan Indikator Kegiatan	15
C. PERJANJIAN KINERJA	18
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN KINERJA	20
B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	27

BAB. IV	PENUTUP	33
	A. KESIMPULAN	33
	B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	33
	C. SARAN	34

LAMPIRAN

**Formulir RS, RKT, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sesuai
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran masing-masing unit kerja**

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1 Jumlah personil	5
2.	Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana	6
3.	Tabel 1.3 Pendapatan	8
4.	Tabel 1.4 Pembiayaan	8
5.	Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran	14
6.	Tabel 2.2 Kegiatan dan Indikator Kegiatan	15
7.	Tabel 3.1 Data Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2011	21
8.	Tabel 3.2 Data Pencapaian Sasaran Tahun 2011	28



LAKIP
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN 2011

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan merupakan tolok ukur Dinas dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Lamongan.

Adapun penyusunan LAKIP Tahun 2011 ini mengacu pada RENSTRA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :

“ Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset “

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;

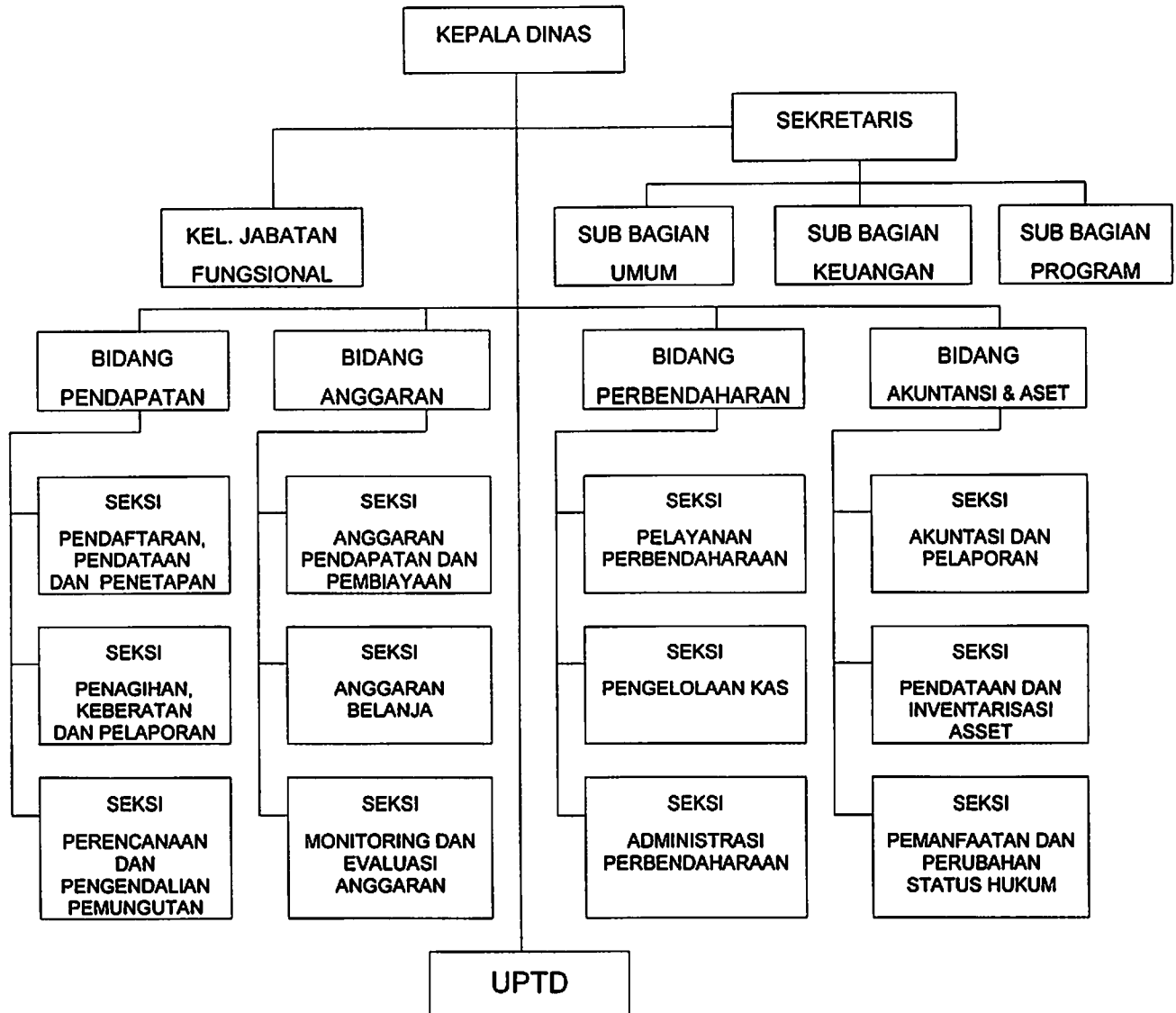
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Sub Bagian;
- d. Kepala Bidang;
- e. Kepala Seksi.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN**



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan, perlu adanya dukungan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendapatan serta Pembiayaan, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL : 1.1
JUMLAH PERSONIL

NO.	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH	PANGKAT / GOL. RUANG	JUMLAH	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Tk.I (IV/b)	1	S 1	1	
2.	Sekretaris	1	Pembina (IV/a)	1	S 2	1	
3.	Kabid	4	- Pembina (IV/a)	1	S 2	1	
			- Penata Tk. I (III/d)	2	S 2	2	
			- Penata (III/c)	1	S 2	1	
4.	Kasubbag.	3	- Penata Tk. I (III/d)	1	S 2	1	
			- Penata (III/c)	1	S 2	1	
			- Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S 2	1	
5.	Kasi	12	- Penata Tk.I (III/d)	2	S 2	2	
			- Penata Tk.I (III/d)	2	S 1	2	
			- Penata Tk.I (III/d)	1	Sarjana Muda	1	
			- Penata (III/c)	3	S 2	3	
			- Penata (III/c)	3	S 1	3	
			- Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S 2	1	
6.	Staf	93	- Penata (III/c)	8	S 1	8	
			- Penata Muda Tk I (III/b)	14	S 1	14	
			- Penata Muda Tk I (III/b)	9	SMA	9	
			- Penata Muda (III/a)	21	S 1	21	
			- Penata Muda (III/a)	1	Sarjana Muda	1	
			- Penata Muda (III/a)	1	SMA	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
			- Pengatur Tk. I (II/d)	1	SMA	1	
			- Pengatur Tk. I (II/d)	1	SMP	1	
			- Pengatur (II/c)	3	Sarjana Muda	3	
			- Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	S 1	1	
			- Pengatur Muda Tk. I (II/b)	16	SMA	16	
			- Pengatur Muda (II/a)	2	S 1	2	
			- Pengatur Muda (II/a)	7	SMA	7	
			- Juru (I/c)	1	SMP	1	
			- Tenaga Kontrak	5	S 1	5	
			- Tenaga Kontrak	2	SMA	2	
	Jumlah	114	Jumlah	114	Jumlah	114	

TABEL : 1.2
SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS	JUMLAH	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	Roda 4 (empat)	9	
2.	Roda 2 (dua)	62	
3.	Komputer	74	
4.	Printer	65	
5.	Lap Top	25	
6.	Mesin Ketik	24	
7.	Mesin Foto Copy	1	
8.	Mesin Ketik Elektrik	1	
9.	Meja Rapat	29	
10.	Meja Tulis/Staf	117	
11.	Meja Mesin Ketik	3	
12.	Meja Telepon	4	
13.	Meja Komputer	9	
14.	Meja Eselon II	1	
15.	Meja Eselon III	5	

1.	2.	3.	4.
16.	Meja Eselon IV	23	
17.	Kursi Eselon II	2	
18.	Kursi Eselon III	6	
19.	Kursi Eselon IV	41	
20.	Lemari Besi	49	
21.	Lemari Kayu	18	
22.	Rak Besi	7	
23.	Rak Kayu	18	
24.	Filling Kabinet	28	
25.	Kipas Angin	8	
26.	AC	24	
27.	Brankas	7	
28.	LCD Proyektor + Attachment	1	
29.	Handy Cam	1	
30.	Tabung PMK	3	
31.	Papan Visual/SO	1	
32.	Papan Pengumuman	5	
33.	White Board	1	
34.	White Board Elektronik	1	
35.	Werelles	1	
36.	Compact Disk	2	
37.	Telepon (PABX)	1	
38.	Pesawat Telepon	5	
39.	Faximile	2	
40.	Tangga Lipat	1	
41.	Televisi	5	
42.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2	
43.	Gambar Garuda	3	
44.	Kursi Putar	1	
45.	Kursi Rapat	12	
46.	Kursi Lipat	254	
47.	Kardek Besi	2	
48.	Lemari Buku untuk Arsip Dinamis	9	
49.	Camera + Attachment	3	
50.	Intercom	7	
51.	Kaca Hias	3	
52.	Gucci	5	
53.	Almari Es	1	

TABEL : 1.3
PENDAPATAN

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET.
1.	<u>PAD Kabupaten TA 2011</u>		
	• Hasil Pajak Daerah • Hasil Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah • Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp 21.146.572.000,00 Rp 12.737.633.000,00 Rp 17.829.736.000,00 Rp 54.508.889.724,00	
Jumlah PAD Kabupaten		Rp 106.222.830.724,00	

TABEL : 1.4
PEMBIAYAAN

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET.
1.	<u>APBD Kabupaten TA 2011</u>		
	• Belanja Tidak Langsung • Belanja Langsung	Rp 177.765.480.382,78 Rp 15.762.988.250,00	
Jumlah APBD Kabupaten		Rp 193.528.468.632,78	
2.	<u>APBD I</u> (Rincian sesuai dengan perkegiatan)	Rp --	
Jumlah APBD I		Rp --	
3	<u>APBN</u> (Rincian sesuai dengan perkegiatan)	Rp --	
Jumlah APBN		Rp --	
Jumlah total 1 + 2 + 3		Rp 193.528.468.632,78	

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis.

Hal ini karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan organisasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan sebagian kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.



LAKIP
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN 2011

BAB II

PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBD yang berorientasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2011.

A. RENCANA STRATEJIK

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH”

Penjelasan Visi :

Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada demi tercapainya tertib administrasi keuangan dan asset-asset daerah untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.

Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.

Disamping itu, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan berupaya menetapkan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA SKPD Tahun 2010-2015, yakni :

➤ **Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Adapun **Misi** Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Meningkatkan pelayanan keuangan daerah, manajemen dan sistem/prosedur pengelolaan keuangan daerah serta pemberdayaan barang/asset daerah;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana barang daerah;
4. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang keuangan dan barang daerah.

➤ **Tujuan**

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja pemerintah sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana barang daerah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

➤ **Sasaran**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin

dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah;
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
4. Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah.

➤ **Kebijakan**

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;
2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
4. Pembentukan kerjasama antar daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011

Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana stratejik yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel : 2.1

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	➤ Peningkatan pajak daerah ➤ Peningkatan retribusi daerah
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah	➤ Ketepatan dalam meneliti RKA dan DPA ➤ Ketepatan penerbitan SPD ➤ Peningkatan penggunaan SAB dalam penyusunan APBD ➤ SP2D terbit tepat waktu ➤ Laporan keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu ➤ Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah ➤ Tertib administrasi barang daerah
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	➤ % Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana
4.	Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah	➤ % Pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah

2. Program

Untuk meningkatkan kebijakan diatas, program yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan tertib administrasi keuangan dan asset/barang daerah.

Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.2

Kegiatan dan Indikator Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarana komunikasi yang memadai
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan baik
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan jasa instalasi listrik (tambah daya)
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya whiteboard, komputer/PC, notebook dan printer

1	2	3
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi
12.	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan	Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS
13.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
14.	Pengadaan meubelair	Tersedianya perlengkapan kantor dan meubelair
15.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Perbaikan bangunan gedung kantor dan aset Pemda
16.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4
17.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2
18.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan kantor
19.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana komputer dan printer
20.	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatkan SDM aparatur
21.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja
22.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran
23.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun
24.	Monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD	Tersedianya laporan keuangan SKPD
25.	Penyusunan standar analisis belanja	Tersedianya buku SAB
26.	Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya buku Perbup tentang kebijakan akuntansi Pemkab.Lamongan
27.	Penyusunan Raperda tentang APBD TA. 2012	Tersedianya dokumen Perda tentang APBD
28.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2012	Tersedianya dokumen peraturan KDH tentang penjabaran APBD
29.	Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD TA. 2011	Tersedianya dokumen Perda tentang perubahan APBD

1	2	3
30.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD TA. 2011	Tersedianya dokumen peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
31.	Penyusunan Perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2010	Tersedianya dokumen Perda perhitungan APBD
32.	Penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 20110	Tersedianya dokumen penjabaran pelaksanaan APBD
33.	Peningkatan manajemen asset/ barang daerah	Meningkatkan SDM aparatur di bidang barang daerah
34.	Penyusunan peraturan Bupati tentang pemungutan pajak daerah	Tersedianya dokumen Perbup tentang pemungutan pajak daerah
35.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Laporan semester I APBD disusun sesuai SAP
36.	Dampingan implementasi sistem akuntansi Pemda Kab.Lamongan	Laporan akuntansi keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu dan sesuai SAP
37.	Evaluasi administrasi perbendaharaan	Meningkatkan SDM aparatur di bidang keuangan daerah
38.	Penyusunan anggaran kas	Tersedianya dokumen anggaran kas
39.	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD)	Tersedianya dokumen SPD
40.	Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD	Penerbitan SP2D tepat waktu
41.	Monitoring dan evaluasi laporan keuangan BUD	Laporan keuangan BUD disusun tepat waktu
42.	Peningkatan pemanfaatan barang daerah	Peningkatan penerimaan PAD
43.	Dampingan implementasi gaji	Laporan keuangan gaji dilaksanakan sesuai ketentuan
44.	Fasilitasi penyaluran dana bantuan, hibah, subsidi dan pembiayaan	Pencairan/penyaluran dana tepat waktu dan tepat sasaran
45.	Verifikasi RKA dan DPA APBD	Pelaksanaan implementasi keuangan daerah tepat waktu
46.	Verifikasi RKA dan DPPA perubahan APBD	Pelaksanaan implementasi keuangan daerah tepat waktu
47.	Monitoring pelaksanaan penatausahaan keuangan pada SKPD	Tertib penatausahaan keuangan
48.	Dampingan implementasi SPP, SPM dan SP2D	Implementasi komputerisasi SPM dan SP2D secara terus menerus
49.	Penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana pemungutan BPHTB	Peningkatan penerimaan BPHTB

1	2	3
50.	Pendataan subyek/obyek pajak daerah	Peningkatan pajak daerah
51.	Pengadaan dan pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan perubahan blanko se Kec. Se Kab.Lamongan	Peningkatan penerimaan PBB
52.	Stimulasi percepatan pelunasan PBB	Peningkatan pelunasan PBB tepat waktu
53.	Gerakan sadar pajak	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu
54.	Intensifikasi penagihan dan monitoring PAD dan PBB	Peningkatan penerimaan PAD dan PBB
55.	Dampingan input RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya data base data keuangan seluruh SKPD
56.	Fasilitasi dan monitoring anggaran bantuan khusus infra struktur dan ekonomi produktif	Tercapainya konsolidasi anggaran bantuan khusus infrastruktur dan ekonomi produktif
57.	Pelatihan akuntansi bagi SKPD Kecamatan	Meningkatkan SDM aparatur di bidang keuangan daerah
58.	Penyusunan perubahan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya standart operasional dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (penetapan kinerja) yang telah ditetapkan pada tahun 2011 merupakan dokumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam rangka untuk mencapai keberhasilan/ target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja (penetapan kinerja) diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Adapun rincian kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (penetapan kinerja) dapat dilihat pada lampiran III.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| 85 – 100 | = Sangat baik/sangat berhasil ; |
| 70 - < 85 | = Baik/berhasil ; |
| 55 - < 70 | = Kurang baik/kurang berhasil ; |
| < 55 | = Sangat kurang baik/tidak berhasil. |



LAKIP
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN 2011

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Renstra Dinas.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan yang telah ditetapkan dalam pengukuran kinerja dapat dilihat pada lampiran IV.

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala ordinal sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat dilihat dari pencapaian sasaran sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini.

TABEL : 3.1
DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011

NO	SASARAN	PENCAPAIAN			
		SANGAT BERHASIL	BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	V	-	-	-
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	V	-	-	-
3.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	V	-	-
4.	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	V	-	-	-
5.	Tersedianya Alat Tulis Kantor	V	-	-	-
6.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	V	-	-	-
7.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	V	-	-	-
8.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	V	-	-	-
9.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	V	-	-	-
10.	Tersedianya Makanan dan Minuman	V	-	-	-
11.	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	V	-	-	-

1	2	3	4	5	6
12.	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	V	-	-	-
13.	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	V	-	-	-
14.	Terlaksananya Pengadaan Meubelair	V	-	-	-
15.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Kantor	V	-	-	-
16.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	V	-	-	-
17.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	V	-	-	-
18.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	V	-	-	-
19.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	V	-	-	-
20.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	V	-	-	-
21.	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	V	-	-	-
22.	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	V	-	-	-
23.	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	V	-	-	-
24.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	V	-	-	-
25.	Terlaksananya Penyusunan Standard Analisis Belanja (SAB)	V	-	-	-
26.	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	V	-	-	-
27.	Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2012	V	-	-	-
28.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012	V	-	-	-
29.	Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011	V	-	-	-
30.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011	V	-	-	-
31.	Terlaksananya Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010	V	-	-	-

1	2	3	4	5	6
32.	Terlaksananya Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010	V	-	-	-
33.	Terwujudnya Peningkatan Mana-jemen Asset/Barang Daerah	V	-	-	-
34.	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Daerah	V	-	-	-
35.	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	V	-	-	-
36.	Terwujudnya Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemda Kab.Lamongan	V	-	-	-
37.	Terlaksananya Evaluasi Administrasi Perbendaharaan	V	-	-	-
38.	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Kas	V	-	-	-
39.	Terlaksananya Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	V	-	-	-
40.	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD	V	-	-	-
41.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD	V	-	-	-
42.	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah	V	-	-	-
43.	Tersedianya Dampingan Implementasi Gaji	V	-	-	-
44.	Terlaksananya Fasilitas Penyaluran Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan	V	-	-	-
45.	Terlaksananya Verifikasi RKA dan DPA APBD	V	-	-	-
46.	Terlaksananya Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD	V	-	-	-
47.	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD	V	-	-	-
48.	Terlaksananya Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D	V	-	-	-
49.	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana Prasarana Pemungutan BPHTB	V	-	-	-
50.	Terlaksananya Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah	V	-	-	-
51.	Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan	V	-	-	-
52.	Terlaksananya Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB	V	-	-	-

1	2	3	4	5	6
53.	Terwujudnya Gerakan Sadar Pajak	V	-	-	-
54.	Terlaksananya Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB	V	-	-	-
55.	Terwujudnya Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA	V	-	-	-
56.	Terlaksananya Fasilitas dan Monitoring Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	V	-	-	-
57.	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Bagi SKPD Kecamatan	V	-	-	-
58.	Terlaksananya Perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	V	-	-	-

Analisa Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1) Sasaran 1, Meningkatnya pendapatan asli daerah

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah, pada tahun 2011 dilaksanakan 1 program yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

(1) Peningkatan pajak daerah

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai peningkatan pajak daerah adalah sebesar Rp. 19.295.048.739,00 (10 %). Target ini lebih rendah dari realisasi tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 21.522.129.217,82 (23 %). Peningkatan ini disebabkan karena adanya intensifikasi aparat pemungut.

(2) Peningkatan retribusi daerah

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai peningkatan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 12.737.633.000,00 (8 %). Target ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 12.621.817.231,00 (7,92 %). Penurunan ini disebabkan karena dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 banyak jenis

retribusi yang dihapus sehingga mengurangi pendapatan retribusi daerah.

2) **Sasaran 2, Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah**
Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah, pada tahun 2011 dilaksanakan 2 program yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

(1) Kecepatan dalam meneliti RKA dan DPA

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai jumlah SKPD yang diteliti RKA dan DPA nya tepat waktu adalah sebesar 100 % (60 SKPD). Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100 %.

(2) Ketepatan penerbitan SPD

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai jumlah SKPD yang SPD nya diterbitkan tepat waktu adalah sebesar 100 % (60 SKPD). Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100 %

(3) Peningkatan penggunaan standard analisis belanja (SAB) dalam penyusunan APBD

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai jumlah SKPD yang menggunakan SAB dalam penyusunan APBD adalah sebesar 100 % (60 SKPD). Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100 %.

(4) SP2D terbit tepat waktu

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai jumlah SKPD yang SP2D nya diterbitkan tepat waktu adalah sebesar 100 % (60 SKPD). Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100 %.

(5) Laporan keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai jumlah SKPD dan SKPKD yang menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai SAP dan Permendagri No 57 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 100 % (60 SKPD). Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100 %.

(6) Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Target yang ditetapkan pada tahun 2010 untuk menilai tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 100 %. Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100 %.

(7) Tertib administrasi barang daerah

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai jumlah SKPD yang melaporkan tepat waktu adalah sebesar 82 % (57 SKPD). Target ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2011 yaitu sebesar 84 % (59 SKPD). Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan administrasi barang daerah.

3) **Sasaran 3, Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, pada tahun 2011 dilaksanakan 2 program yaitu :

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

(1) Persentase Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang dipenuhi adalah sebesar 100 %. Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100 %.

4) **Sasaran 4, Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah**

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah, pada tahun 2010 dilaksanakan 2 program yaitu :

- 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- (1) Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah

Target yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk menilai jumlah aparat yang mengikuti pembinaan/pelatihan keuangan dan barang daerah adalah sebesar 100 %. Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100 %.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1 PENDAPATAN

Target pendapatan daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sesuai perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 1.274.148.898.220,00, target ini terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	52.538.798.000,00
2.	Dana Perimbangan	855.470.934.750,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	366.139.165.470,00
	Total	1.274.148.898.220,00

Dari target tersebut pada tahun 2011 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.266.366.722.518,77 Atau tercapai sebesar 99,39 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	44.387.395.121,77
2.	Dana Perimbangan	859.140.092.542,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	362.839.234.855,00
	Total	1.266.366.722.518,77

2 BELANJA

Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan tahun 2011 terdiri dari :

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	177.765.480.382,78
2.	Belanja Langsung	15.762.988.250,00
	Total	193.528.468.632,78

Dari plafond belanja tersebut pada tahun 2011 direalisasikan sebesar Rp. 175.812.290.938,54 Atau tercapai sebesar 90,85 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	160.567.731.540,54
2.	Belanja Langsung	15.244.559.398,00
	Total	175.812.290.938,54

Rincian belanja langsung tahun 2011 sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2
DATA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011

NO	SASARAN	ANGGARAN		%
		RENCANA Rp.	REALISASI Rp.	
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	5.500.000,-	5.500.000,-	100
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	20.400.000,-	18.849.248,-	92,40

1	2	3	4	5
3.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.710.000,-	21.169.650,-	82,34
4.	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	26.000.000,-	25.600.000,-	98,46
5.	Tersedianya Alat Tulis Kantor	94.500.000,-	91.578.700,-	96,91
6.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	136.195.000,-	133.754.995,-	98,21
7.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	117.000.000,-	116.482.000,-	99,56
8.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.500.000,-	171.550.000,-	94,52
9.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,-	12.634.000,-	97,18
10.	Tersedianya Makanan dan Minuman	80.000.000,-	80.000.000,-	100
11.	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	125.000.000,-	124.950.200,-	99,96
12.	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan	63.900.000,-	62.009.700,-	97,04
13.	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	10.583.283.250,-	10.119.502.805,-	95,62
14.	Terlaksananya Pengadaan Meubelair	118.300.000,-	117.825.000,-	99,60
15.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	421.500.000,-	419.369.000,-	99,49
16.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	23.000.000,-	23.000.000,-	100
17.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	120.000.000,-	119.950.000,-	99,96
18.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	32.200.000,-	32.199.600,-	100
19.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	33.000.000,-	33.000.000,-	100

1	2	3	4	5
20.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000,-	49.915.000,-	99,83
21.	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,-	7.500.000,-	100
22.	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7.500.000,-	7.473.200,-	99,64
23.	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.500.000,-	7.473.200,-	99,64
24.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	40.500.000,-	40.394.300,-	99,74
25.	Terlaksananya Penyusunan Standard Analisis Belanja (SAB)	165.000.000,-	164.892.900,-	99,94
26.	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	50.000.000,-	49.484.000,-	98,97
27.	Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2012	215.000.000,-	214.400.000,-	99,72
28.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012	208.177.500,-	207.734.700,-	99,79
29.	Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011	166.241.000,-	166.209.900,-	99,98
30.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011	160.581.500,-	160.542.000,-	99,98
31.	Terlaksananya Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010	155.000.000,-	154.057.550,-	99,39
32.	Terlaksananya Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010	140.000.000,-	139.977.000,-	99,98
33.	Terwujudnya Peningkatan Mana-jemen Asset/Barang Daerah	80.000.000,-	79.184.000,-	98,98

1	2	3	4	5
34.	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Daerah	25.000.000,-	24.580.000,-	98,32
35.	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	64.000.000,-	63.949.000,-	99,92
36.	Terwujudnya Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemda Kab.Lamongan	89.000.000,-	87.743.600,-	98,59
37.	Terlaksananya Evaluasi Administrasi Perbendaharaan	85.000.000,-	84.646.050,-	99,58
38.	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Kas	80.000.000,-	79.935.700,-	99,92
39.	Terlaksananya Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	60.000.000,-	59.869.500,-	99,78
40.	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD	95.000.000,-	94.558.200,-	99,53
41.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD	70.000.000,-	69.963.000,-	99,95
42.	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah	52.000.000,-	50.704.500,-	97,51
43.	Tersedianya Dampingan Implementasi Gaji	105.000.000,-	104.520.600,-	99,54
44.	Terlaksananya Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan	100.000.000,-	98.959.700,-	98,96
45.	Terlaksananya Verifikasi RKA dan DPA APBD	100.000.000,-	99.942.550,-	99,94
46.	Terlaksananya Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD	90.000.000,-	89.583.000,-	99,54
47.	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD	55.000.000,-	53.907.000,-	98,01
48.	Terlaksananya Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D	90.000.000	89.121.500,-	99,02
49.	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana Prasarana Pemungutan BPHTB	175.000.000,-	174.045.000,-	99,45
50.	Terlaksananya Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah	50.000.000,-	49.819.200,-	99,64

1	2	3	4	5
51.	Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan	100.000.000,-	94.072.500,-	94,07
52.	Terlaksananya Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB	45.000.000,-	44.250.000,-	98,33
53.	Terwujudnya Gerakan Sadar Pajak	75.000.000,-	71.275.000,-	95,03
54.	Terlaksananya Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB	160.000.000,-	156.292.000,-	97,68
55.	Terwujudnya Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA	100.000.000,-	99.985.900,-	99,99
56.	Terlaksananya Fasilitasi dan Monitoring Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	85.000.000,-	84.942.000,-	99,93
57.	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Bagi SKPD Kecamatan	40.000.000,-	40.000.000,-	100
58.	Terlaksananya Perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000,-	99.731.250,-	99,73

Untuk mewujudkan 58 (lima puluh delapan) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2011, tersedia dana sebesar Rp. 15.762.988.250,- yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2011, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 15.244.559.398,- sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 518.428.852,-.



LAKIP
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN 2011

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2011 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam penyusunan LAKIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan .

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas terdapat 5 (lima) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010 - 2015 sebagaimana daftar analisis terlampir.

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Meski capaian kinerja tahun 2011 diatas rata-rata target yang ditetapkan dalam RPJMD, namun permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan adalah :

- 1 Masih minimnya personil yang lulus/memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu syarat dapat ditunjuknya yang bersangkutan

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan atau Pejabat Pengandaan;

- 2 Masih ada beberapa asset milik Pemerintah dan Pemprop Jatim yang berlokasi di Kabupaten Lamongan sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kab.Lamongan;
- 3 Belum semua SKPD yang ada di Kabupaten Lamongan terutama yang ada di Kecamatan mempunyai SDM (khususnya petugas pelaporan akuntansi dan pembuat SPM) yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan lancar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, solusi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1 Mengikutsertakan sebagian personil secara bertahap pada setiap diadakannya pelatihan dan ujian sertifikasi ahli pengadaan;
- 2 Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan asset dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal
- 3 Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan melalui pelatihan akuntansi dan pelatihan komputer.

C. S A R A N

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas Seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Para penyusun Rencana Stratejik berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Pendapatan Asli Daerah mengingat dengan diberlakukannya undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru yakni UU

28 tahun 2009 dapat memperkuat pembiayaan APBD Kabupaten Lamongan
kedepan.

Lamongan, Januari 2012

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HERY PRANOTO

Pembina Tingkat I

NIP. 19620805 198903 1 001



LAKIP
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN 2011

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEJIK (RS)

**RENCANA STRATEJIK
TAHUN 2011**

Unit Kerja : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan

Formulir RS

Visi : " TERWUJUDNYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH "

Misi : 1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah	1. Peningkatan pajak daerah 2. Peningkatan retribusi daerah	Meningkatan pendapatan asli daerah	1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	

**RENCANA STRATEJIK
TAHUN 2011**

Unit Kerja : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan

Formulir RS

Visi : " TERWUJUDNYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH "

Misi : 2. Meningkatkan Pelayanan Keuangan Daerah, Manajemen dan Sistem/Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah serta Pemberdayaan Barang/Asset Daerah

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah	2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah	1. Ketepatan dalam meneliti RKA dan DPA 2. Ketepatan penerbitan SPD 3. Peningkatan penggunaan SAB dalam penyusunan APBD 4. SP2D terbit tepat waktu 5. Laporan keuangan SKPD dan SKPKD disusun tepat waktu 6. Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 7. Tertib administrasi barang daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah	1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	

**RENCANA STRATEGIK
TAHUN 2011**

Unit Kerja : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan

Formulir RS

Visi : " TERWUJUDNYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH "

Misi : 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Barang Daerah

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana barang daerah	3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1. % Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	

**RENCANA STRATEJIK
TAHUN 2011**

Unit Kerja : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan

Formulir RS

Visi : " TERWUJUDNYA EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH "

Misi : 4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Keuangan dan Barang Daerah

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur	4 Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah	1. % Pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	



LAKIP
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN 2011

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2011**

UNIT KERJA : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

FORMAT RKT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatkan pendapatan asli daerah	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Tersedianya Potensi Pajak Daerah <u>Outcome :</u> ➤ Peningkatan Pajak Daerah	25.000.000,00 4 jenis pajak 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Penerimaan PAD dari Penjualan dan Pemanfaatan Barang Daerah <u>Outcome :</u> ➤ Peningkatan Penerimaan PAD	52.000.000,00 59 SKPD 0,01 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Tersedianya Sarana Prasarana Pemungutan BPHTB <u>Outcome :</u> ➤ Peningkatan Pelayanan BPHTB	175.000.000,00 24 unit 5 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Tersedianya Potensi Pajak Daerah <u>Outcome :</u> ➤ Peningkatan Pajak Daerah	50.000.000,00 10 jenis pajak 5 %

1	2	3
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Terlaksananya Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko ke Kec. se Kab.Lamongan <u>Outcome :</u> ➤ Meningkatnya Penerimaan PBB	100.000.000,00 27 Kecamatan 5 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Stimulan Peningkatan Pendapatan Daerah <u>Outcome :</u> ➤ Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu	45.000.000,00 27 Kecamatan 5 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Gerakan Sadar Pajak <u>Outcome :</u> ➤ Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Tepat Waktu	75.000.000,00 Masyarakat 75 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB <u>Outcome :</u> ➤ Intensifikasi PAD dan PBB	160.000.000,00 22 Dinas Penghasil & 27 Kec. 100 %
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Buku Standard Analisis Belanja Tahun 2012 <u>Outcome :</u> ➤ Efisiensi dan Efektifitas Penyusunan APBD TA. 2012	165.000.000,00 100 buku 100 %

1	2	3
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Buku Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab.Lmg <u>Outcome :</u> ➤ Kebijakan Akuntansi Pemkab.Lmg	50.000.000,00 100 buku 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD <u>Outcome :</u> ➤ Terlaksananya Implementasi Keuangan Daerah Tepat Waktu	215.000.000,00 275 buku 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah Tepat Waktu	208.177.500,00 275 buku 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah Tepat Waktu	166.241.000,00 250 buku 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah Tepat Waktu	160.581.500,00 250 buku 100 %

1	2	3
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) <u>Outcome :</u> ➤ Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	155.000.000,00 150 buku 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Buku Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2010 <u>Outcome :</u> ➤ Dokumen Penjabaran Pelaksanaan APBD 2010 Tepat Waktu	140.000.000,00 150 buku 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Jumlah Aparat Pengelola Aset/Barang Daerah yang dilatih <u>Outcome :</u> ➤ Data Aset/Barang Daerah yang Akurat	80.000.000,00 60 orang 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Laporan Akuntansi Keuangan SKPD dan SKPKD Tahun 2011 <u>Outcome :</u> ➤ Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP	89.000.000,00 63 SKPD 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Buku Anggaran Kas Pemda Kab.Lamongan TA. 2011 <u>Outcome :</u> ➤ Dokumen Anggaran Kas yang Tepat Waktu	80.000.000,00 62 SKPD 100 %

1	2	3
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi 63 SKPD <u>Outcome :</u> ➤ SPD yang Terbit Tepat Waktu	60.000.000,00 378 dokumen 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Aplikasi SP2D <u>Outcome :</u> ➤ Penerbitan SP2D Tepat Waktu	95.000.000,00 60 SKPD 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Laporan Posisi Kas Daerah dan Rekonsiliasi Kas dan Bank <u>Outcome :</u> ➤ Laporan Keuangan BUD	70.000.000,00 12 bulan 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Kelancaran Proses Administrasi Gaji <u>Outcome :</u> ➤ Laporan Keuangan Gaji dan Pertanggungjawaban Keuangan Gaji telah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	105.000.000,00 59 SKPD 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Pencairan Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan <u>Outcome :</u> ➤ Pencairan/Penyaluran Dana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	100.000.000,00 86 bantuan 100 %

1	2	3
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Adanya Keselarasan RKA dan DPA pada Dokumen APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100.000.000,00 61 SKPD 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Adanya Keselarasan RKA dan DPPA pada Dokumen APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	90.000.000,00 61 SKPD 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Laporan Pertanggungjawaban <u>Outcome :</u> ➤ Tertib Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	55.000.000,00 12 x laporan 63 SKPD 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Implementasi Komputerisasi SPM dan SP2D secara Terus Menerus <u>Outcome :</u> ➤ Akurasi Data-data Administrasi SPM dan SP2D	90.000.000,00 60 SKPD 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Database RKA, DPA dan DPPA	100.000.000,00 63 SKPD

1	2	3
	Outcome : ➤ Efisiensi dan Efektifitas Penyusunan APBD	100 %
	Input : Dana Output : ➤ Pelaksanaan Fasilitas dan Monitoring Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif Outcome : ➤ Tercapainya Konsolidasi Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	85.000.000,00 1 tahun 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Dokumen Prosedur Penganggaran Keuangan Daerah Outcome : ➤ Standarisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Lamongan	100.000.000,00 150 buku 100 %
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Input : Dana Output : ➤ Penambahan Daya Listrik Outcome : ➤ Terpenuhinya Penerangan Bangunan Kantor/Penambahan Daya Listrik	117.000.000,00 82.500 VA 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Whiteboard,Komputer/ PC, Notebook, Printer) Outcome : ➤ Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.500.000,00 37 unit 100 %
	Input : Dana	10.583.283.250,00

1	2	3
	Output : ➤ Kendaraan Dinas Outcome : ➤ Pemenuhan Kekurangan Kebutuhan Kendaraan Dinas	477 unit 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : ➤ Perlengkapan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan	118.300.000,00 117 unit 100 %
4. Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah	Input : Dana Output : ➤ Meningkatnya Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek Outcome : ➤ Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00 13 orang 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Jumlah Bendahara di SKPD Outcome : ➤ Meningkatkan Kemampuan Bendahara	85.000.000,00 59 SKPD 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Akuntansi Outcome : ➤ Pembuatan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	40.000.000,00 27 Kecamatan 100 %



LAKIP
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN 2011

LAMPIRAN III

PENETAPAN KINERJA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

UNIT KERJA : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN Rp.
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	• Penyusunan Standard Analisis Belanja	• Buku Standard Analisis Belanja Tahun 2012	100 buku	• Efisiensi dan Efektifitas Penyusunan APBD TA 2012	100 %	165.000.000,00
		• Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	• Buku Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab. Lmg	100 buku	• Kebijakan Akuntansi Pemkab. Lmg	100 %	50.000.000,00
		• Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012	• Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD	275 buku	• Terlaksananya Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100 %	215.000.000,00
		• Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012	• Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	275 buku	• Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100 %	208.177.500,00
		• Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011	• Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	250 buku	• Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100 %	166.241.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		• Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011	• Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	250 buku	• Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100 %	160.581.500,00
		• Penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010	• Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)	150 buku	• Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	155.000.000,00
		• Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010	• Buku Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010	150 buku	• Dokumen Penjabaran Pelaksanaan APBD 2010 Tepat Waktu	100 %	140.000.000,00
		• Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	• Jumlah Aparat Pengelola Aset/Barang Daerah yang dilatih/dibina	60 orang	• Data Aset/Barang Daerah yang Akurat	100 %	80.000.000,00
		• Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Daerah	• Tersedianya Potensi Pajak Daerah	4 jenis pajak	• Peningkatan Pajak Daerah	100 %	25.000.000,00
		• Dampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kab.Lmg Tahun 2011	• Laporan Akuntansi Keuangan SKPD dan SKPKD tahun 2011	63 SKPD	• Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang Tepat Waktu dan sesuai SAP	100 %	89.000.000,00
		• Evaluasi Administrasi Perbendaharaan	• Jumlah Bendahara di SKPD	59 SKPD	• Meningkatkan Kemampuan Bendahara	100 %	85.000.000,00
		• Penyusunan anggaran kas	• Buku Anggaran Kas Pemda Kab.Lamongan TA. 2011	62 SKPD	• Dokumen Anggaran Kas yang Tepat Waktu	100 %	80.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi 63 SKPD	378 dokumen	SPD yang Terbit Tepat Waktu	100 %	60.000.000,00
		Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja SKPD	Aplikasi SP2D	60 SKPD	Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100 %	95.000.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan BUD	Laporan Posisi Kas Daerah dan Rekonsiliasi Kas dan Bank	12 bulan	Laporan Keuangan BUD	100 %	70.000.000,00
		Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah	Penerimaan PAD dari Penjualan & Pemanfaatan Barang Daerah	59 SKPD	Peningkatan Penerimaan PAD	0,01 %	52.000.000,00
		Dampingan Implementasi Gaji	Kelancaran Proses Administrasi Gaji	59 SKPD	Laporan Keuangan Gaji dan Pertanggungjawaban Keuangan Gaji telah dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	105.000.000,00
		Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan	Pencairan Dana Bantuan, Hibah, Subsidi, dan Pembiayaan	86 bantuan	Pencairan/ Penyaluran Dana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	100 %	100.000.000,00
		Verifikasi RKA dan DPA APBD	Adanya Keselarasan RKA dan DPA pada Dokumen APBD	61 SKPD	Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100 %	100.000.000,00
		Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD	Adanya Keselarasan RKA dan DPPA pada dokumen APBD	61 SKPD	Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100 %	90.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan pada SKPD	Dokumen Laporan Pertanggung jawaban	12 x laporan 63 SKPD	Tertib Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	100 %	55.000.000,00
		Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D	Implementasi Komputerisasi SPM dan SP2D secara terus menerus	60 SKPD	Akurasi Data-data Administrasi SPM dan SP2D	100 %	90.000.000,00
		Penyediaan dan Distribusi Sarana Prasarana Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersedianya Sarana Prasarana Pemungutan BPHTB	24 unit	Peningkatan Pelayanan BPHTB	5 %	175.000.000,00
		Pendataan Subyek Obyek Pajak Daerah	Tersedianya Potensi Pajak Daerah	10 jenis pajak	Peningkatan Pajak Daerah	5 %	50.000.000,00
		Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko ke Kecamatan se Kabupaten Lamongan	Terlaksananya Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko ke Kecamatan se Kabupaten Lamongan	27 Kecamatan	Meningkatnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	5 %	100.000.000,00
		Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB	Stimulan Peningkatan Pendapatan Daerah	27 Kecamatan	Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu	5 %	45.000.000,00
		Gerakan Sadar Pajak	Gerakan Sadar Pajak	Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Tepat Waktu	75 %	75.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB	Peningkatan penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB	22 Dinas Penghasil dan 27 Kec.	Intensifikasi PAD dan PBB	100 %	160.000.000,00
		Dampingan input RKA, DPA dan DPPA	Database RKA, DPA dan DPPA	63 SKPD	Efisiensi dan Efektifitas Penyusunan APBD	100 %	100.000.000,00
		Fasilitasi dan Monitoring Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	Pelaksanaan Fasilitasi dan Monitoring Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	1 tahun	Tercapainya Konsolidasi Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	100 %	85.000.000,00
		Pelatihan Akuntansi bagi SKPD Kecamatan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Akuntansi	27 Kecamatan	Pembuatan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	100 %	40.000.000,00
		Penyusunan Perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Prosedur Penganggaran Keuangan Daerah	150 buku	Standarisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Lamongan	100 %	100.000.000,00
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek	13 orang	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia	100 %	50.000.000,00
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas	477 unit	Pemenuhan Kekurangan Kebutuhan Kendaraan Dinas	100 %	10.583.283.250,00
		Pengadaan Meubelair	Perlengkapan Gedung Kantor	117 unit	Perlengkapan Gedung Kantor sesuai Kebutuhan	100 %	118.300.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	• Penambahan Daya Listrik	82.500 VA	• Terpenuhiya Penerangan Bangunan Kantor/ Penambahan Daya Listrik	100 %	117.000.000,00
		• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Peralatan dan Perlengkapan Kantor (White board, Komputer/ PC, Notebook, Printer)	37 unit	• Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	181.500.000,00

Jumlah Anggaran : Rp. 15.762.988.250,00

Program :

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	= Rp. 888.705.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	= Rp. 11.331.283.250,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	= Rp. 50.000.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	= Rp. 63.000.000,00
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	= Rp. 3.430.000.000,00



LAKIP
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
KABUPATEN LAMONGAN 2011

LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

UNIT KERJA : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan pendapatan asli daerah	Input : Dana	25.000.000,00	24.580.000,00	98,32 %
	Output : ➤ Tersedianya Potensi Pajak Daerah	4 jenis pajak	4 jenis pajak	100 %
	Outcome : ➤ Peningkatan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %
	Input : Dana	52.000.000,00	50.704.500,00	97,51 %
	Output : ➤ Penerimaan PAD dari Penjualan dan Pemanfaatan Barang Daerah	59 SKPD	59 SKPD	100 %
	Outcome : ➤ Peningkatan Penerimaan PAD	0,01 %	0,01 %	100 %
	Input : Dana	175.000.000,00	174.045.000,00	99,45
	Output : ➤ Tersedianya Sarana Prasarana Pemungutan BPHTB	24 unit	24 unit	100 %
	Outcome : ➤ Peningkatan Pelayanan BPHTB	5 %	5 %	100 %
	Input : Dana	50.000.000,00	49.819.200,00	99,64 %
	Output : ➤ Tersedianya Potensi Pajak Daerah	10 jenis pajak	10 jenis pajak	100 %

1	2			3
	Outcome : Peningkatan Pajak Daerah	5 %	5 %	100 %
	Input : Dana	100.000.000,00	94.072.500,00	94,07 %
	Output : ➢ Terlaksananya Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko ke Kec. se Kab.Lamongan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	100 %
	Outcome : ➢ Meningkatnya Penerimaan PBB	5 %	5 %	100 %
	Input : Dana	45.000.000,00	44.250.000,00	98,33 %
	Output : ➢ Stimulan Peningkatan Pendapatan Daerah	27 Kecamatan	27 Kecamatan	100 %
	Outcome : ➢ Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu	5 %	5 %	100 %
	Input : Dana	75.000.000,00	71.275.000,00	95,03 %
	Output : ➢ Gerakan Sadar Pajak	Masyarakat	Masyarakat	100 %
	Outcome : ➢ Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Tepat Waktu	75 %	75 %	100 %
	Input : Dana	160.000.000,00	156.292.000,00	97,68 %
	Output : ➢ Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB	22 Dinas Penghasil & 27 Kec.	22 Dinas Penghasil & 27 Kec.	100 %
	Outcome : ➢ Intensifikasi PAD dan PBB	100 %	100 %	100 %

1	2			3
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Buku Standard Analisis Belanja Tahun 2012 <u>Outcome :</u> ➤ Efisiensi dan Efektifitas Penyusunan APBD TA. 2012	165.000.000,00 100 buku 100 %	164.892.900,00 100 buku 100 %	99,94 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Buku Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab.Lmg <u>Outcome :</u> ➤ Kebijakan Akuntansi Pemkab.Lmg	50.000.000,00 100 buku 100 %	49.484.000,00 100 buku 100 %	98,97 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD <u>Outcome :</u> ➤ Terlaksananya Implementasi Keuangan Daerah Tepat Waktu	215.000.000,00 275 buku 100 %	214.400.000,00 275 buku 100 %	99,72 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah Tepat Waktu	208.177.500,00 275 buku 100 %	207.734.700,00 275 buku 100 %	99,79 % 100 % 100 %

1	2			3
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah Tepat Waktu	166.241.000,00 250 buku 100 %	166.209.900,00 250 buku 100 %	99,98 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah Tepat Waktu	160.581.500,00 250 buku 100 %	160.542.000,00 250 buku 100 %	99,98 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) <u>Outcome :</u> ➤ Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	155.000.000,00 150 buku 100 %	154.057.550,00 150 buku 100 %	99,93 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Buku Penjabaran Pelaksanaan APBD TA. 2010 <u>Outcome :</u> ➤ Dokumen Penjabaran Pelaksanaan APBD 2010 Tepat Waktu	140.000.000,00 150 buku 100 %	139.977.000,00 150 buku 100 %	99,98 % 100 % 100 %

1	2			3
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Jumlah Aparat Pengelola Aset/Barang Daerah yang dilatih <u>Outcome :</u> ➤ Data Aset/Barang Daerah yang Akurat	80.000.000,00 60 orang 100 %	79.184.000,00 60 orang 100 %	98,98 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Laporan Akuntansi Keuangan SKPD dan SKPKD Tahun 2011 <u>Outcome :</u> ➤ Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP	89.000.000,00 63 SKPD 100 %	87.743.600,00 63 SKPD 100 %	98,59 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Buku Anggaran Kas Pemda Kab.Lamongan TA. 2011 <u>Outcome :</u> ➤ Dokumen Anggaran Kas yang Tepat Waktu	80.000.000,00 62 SKPD 100 %	79.935.700,00 62 SKPD 100 %	99,92 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi 63 SKPD <u>Outcome :</u> ➤ SPD yang Terbit Tepat Waktu	60.000.000,00 378 dokumen 100 %	59.869.500,00 378 dokumen 100 %	99,78 % 378 dokumen 100 %
	<u>Input :</u> Dana	95.000.000,00	94.558.200,00	99,53 %

1	2			3
	Output : ➤ Aplikasi SP2D Outcome : ➤ Penerbitan SP2D Tepat Waktu	60 SKPD 100 %	60 SKPD 100 %	100 % 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Laporan Posisi Kas Daerah dan Rekonsiliasi Kas dan Bank Outcome : ➤ Laporan Keuangan BUD	70.000.000,00 12 bulan 100 %	69.963.000,00 12 bulan 100 %	99,95 % 100 % 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Kelancaran Proses Administrasi Gaji Outcome : ➤ Laporan Keuangan Gaji dan Pertanggungjawaban Keuangan Gaji telah Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	105.000.000,00 59 SKPD 100 %	104.520.600,00 59 SKPD 100 %	99,54 % 100 % 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Pencairan Dana Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan Outcome : ➤ Pencairan/Penyaluran Dana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	100.000.000,00 86 bantuan 100 %	98.959.700,00 86 bantuan 100 %	98,96 % 100 % 100 %
	Input : Dana Output :	100.000.00,00	99.942.550,00	99,94 %

1	2			3
	➤ Adanya Keselarasan RKA dan DPA pada Dokumen APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	61 SKPD 100 %	61 SKPD 100 %	100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Adanya Keselarasan RKA dan DPPA pada Dokumen APBD <u>Outcome :</u> ➤ Pelaksanaan Implementasi Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	90.000.000,00 61 SKPD 100 %	89.583.000,00 61 SKPD 100 %	99,54 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Dokumen Laporan Pertanggungjawaban <u>Outcome :</u> ➤ Tertib Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	55.000.000,00 12 x laporan 63 SKPD 100 %	53.907.000,00 12 x laporan 63 SKPD 100 %	98,01 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Implementasi Komputerisasi SPM dan SP2D secara Terus Menerus <u>Outcome :</u> ➤ Akurasi Data-data Administrasi SPM dan SP2D	90.000.000,00 60 SKPD 100 %	89.121.500,00 60 SKPD 100 %	99,02 % 100 % 100 %
	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> ➤ Database RKA, DPA dan DPPA	100.000.000,00 63 SKPD	99.985.900,00 63 SKPD	99,99 % 100 %

1	2			3
	Outcome : ➤ Efisiensi dan Efektifitas Penyusunan APBD	100 %	100 %	100 %
	Input : Dana Output : ➤ Pelaksanaan Fasilitasi dan Monitoring Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif Outcome : ➤ Tercapainya Konsolidasi Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	85.000.000,00 1 tahun 100 %	84.942.000,00 1 tahun 100 %	99,93 % 100 % 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Dokumen Prosedur Penganggaran Keuangan Daerah Outcome : ➤ Standarisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Lamongan	100.000.000,00 150 buku 100 %	99.731.250,00 150 buku 100 %	99,73 % 100 % 100 %
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Input : Dana Output : ➤ Penambahan Daya Listrik Outcome : ➤ Terpenuhinya Penerangan Bangunan Kantor/Penambahan Daya Listrik	117.000.000,00 82.500 VA 100 %	116.482.000,00 82.500 VA 100 %	99,56 % 100 % 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.500.000,00 37 unit	171.550.000,00 37 unit	94,52 % 100 %

1	2			3
	(Whiteboard,Komputer/ PC, Notebook, Printer) Outcome : ➤ Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %
	Input : Dana Output : ➤ Kendaraan Dinas Outcome : ➤ Pemenuhan Kekurangan Kebutuhan Kendaraan Dinas	10.583.283.250,00 477 unit 100 %	10.119.502.805,00 477 unit 100 %	95,62 % 100 % 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : ➤ Perlengkapan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan	118.300.000,00 117 unit 100 %	117.825.000,00 117 unit 100 %	99,60 % 100 % 100 %
4. Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah	Input : Dana Output : ➤ Meningkatnya Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan dan Bimtek Outcome : ➤ Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00 13 orang 100 %	49.915.000,00 13 orang 100 %	99,83 % 100 % 100 %
	Input : Dana Output : ➤ Jumlah Bendahara di SKPD	85.000.000,00 59 SKPD	84.646.050,00 59 SKPD	99,58 % 100 %

1	2			3
	Outcome : ➢ Meningkatkan Kemampuan Bendahara	100 %	100 %	100 %
	Input : Dana	40.000.000,00	40.000.000,00	100 %
	Output : ➢ Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Akuntansi	27 Kecamatan	27 Kecamatan	100 %
	Outcome : ➢ Pembuatan Laporan Keuangan yang sesuai SAP	100 %	100 %	100 %

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 15.762.988.250,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 15.244.559.398,00

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	5.500.000,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	18.849.248,00
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	21.169.650,00
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.	25.600.000,00
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	91.578.700,00
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	133.754.995,00
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	116.482.000,00
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	171.550.000,00
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	12.634.000,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	80.000.000,00
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp.	124.950.200,00
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Rp.	62.009.700,00
13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	10.119.502.805,00
14. Pengadaan Meubelair	Rp.	117.825.000,00
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Rp.	419.369.000,00
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp.	23.000.000,00
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	119.950.000,00
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp.	32.199.600,00
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp.	33.000.000,00

52.	Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB	Rp.	44.250.000,00
53.	Gerakan Sadar Pajak	Rp.	71.275.000,00
54.	Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB	Rp.	156.292.000,00
55.	Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA	Rp.	99.985.900,00
56.	Fasilitasi dan Monitoring Anggaran Bantuan Khusus Infrastruktur dan Ekonomi Produktif	Rp.	84.942.000,00
57.	Pelatihan Akuntansi bagi SKPD Kecamatan	Rp.	40.000.000,00
58.	Penyusunan Perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	99.731.250,00